



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROHIDIN MERSYAH
2. Jabatan : GUBERNUR
3. NHK : 207917

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.600.000.000**

1. Tanah Seluas 1200 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 60000 m2 di KAB / KOTA BENGKULU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 553 m2/216 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
4. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 910 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 279.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOBIL, TOYOTA HARRIER Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 265.000.000**

D. SURAT BERTHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 956.059.062**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 4.100.059.062**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.100.059.062

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.